

Keentingan Nasional Arab Saudi dalam Kebijakan Intervensi Militer di Yaman terhadap Keterlibatan Iran

Falhan Hakiki dan Deasy Silvy Sari
Universitas Padjajaran

Abstrak

Fenomena Arab Spring di Yaman telah menimbulkan terjadinya intervensi negara lain terhadap situasi domestiknya. Intervensi ini dilihat pada kebijakan intervensi militer Arab Saudi di Yaman yang dilatar belakangi oleh keterlibatan Iran terhadap situasi domestik di Yaman akibat dari Arab Spring. Kebijakan ini juga menjadi kepentingan nasional Arab Saudi yang tidak lepas dari konflik antara Arab Saudi dan Yaman sendiri. Dengan menggunakan kerangka konseptual kepentingan nasional, serta metode penelitian kualitatif, terdapat empat kepentingan nasional Arab Saudi dalam kebijakan intervensi militer ini. Pertama, kepentingan pertahanan yaitu untuk mempertahankan batas negaranya dari ancaman Iran yang bergabung dengan pemberontak Houthi di mana Yaman berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Kedua, kepentingan ekonomi yaitu didasari oleh bantuan ekonomi Iran yang diberikan kepada pemberontak Houthi. Ketiga, kepentingan tatanan dunia yaitu menegaskan status Arab Saudi sebagai regional power di Timur Tengah. Keempat, yaitu kepentingan ideologis yaitu Arab Saudi menggambarkan intervensi militernya ini sebagai perlawanan terhadap pengaruh Syiah yang dibawa oleh Iran di Yaman.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional; Kebijakan Intervensi Militer; Arab Saudi; Iran; Yaman

The Arab Spring phenomenon in Yemen has led to other states intervening in the domestic situation. This intervention was seen in Saudi Arabia's military intervention policy in Yemen which was motivated by Iran's involvement in the domestic situation in Yemen as a result of the Arab Spring. By using the conceptual framework of national interests, as well as qualitative research methods, it is found that there are four national interests of Saudi Arabia in this military intervention policy. First, the defense interest is to defend the borders of the country from the threat of Iran joining the Houthi rebels where Yemen borders directly with Saudi Arabia. Second, economic interest is based on Iranian economic assistance provided to Houthi rebels. Third, the interests of the world order are to assert Saudi Arabia's status as regional power in the Middle East. Fourth, namely the ideological interests namely Saudi Arabia described this military intervention as an opposition to the Shiite influence brought by Iran in Yemen.

Keywords: AUKUS, Australia, budaya strategik, submarine



Pendahuluan

Fenomena *Arab Spring* ialah sebuah fenomena gelombang protes besar-besaran, pemberontakan militer terhadap pemerintahan yang melanda di negara-negara Timur Tengah. *Arab Spring* sendiri dimulai pada tahun 2011 berawal aksi protes besar-besaran terhadap presiden Bouazizi di Tunisia dan menyebar ke negara-negara seperti Mesir, Suriah, Bahrain, Yaman, dan negara Timur Tengah lainnya. *Arab Spring* juga melanda Yaman yang dimulai pada 16 Januari 2011 dengan demonstrasi kecil di kota Sana'a. Demonstrasi ini menyerukan tuntutan untuk Presiden Ali Abdullah Saleh mundur (Jamshidi 2014, 11-12). Selanjutnya di bulan Februari 2011, setelah jatuhnya presiden Mesir Hosni Mubarak para pengunjuk rasa mulai turun di kota Sana'a dengan jumlah massa yang lebih besar untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Rezim Saleh mengambil tindakan dengan menerjunkan aparat pemerintahannya untuk meredam aksi protes tersebut dengan menimbulkan korban jiwa 52 orang demonstran (Juneau 2013, 409-410).

Melihat protes yang semakin merebak dan terus membesar, membuat Saleh mundur dari presiden Yaman setelah berkuasa selama 33 tahun pada November 2011. Selanjutnya pada Februari 2012, dilakukan pemilihan presiden yang akhirnya mengantarkan Abdu Rabbu Mansour Hadi menduduki presiden baru Yaman (Jamshidi 2014, 12). Namun naiknya Hadi sebagai presiden baru Yaman ternyata juga mengalami aksi protes kembali, terutama pada kelompok Houthi. Kelompok Houthi merupakan gerakan politik Yaman yang menentang Hadi sebagai presiden baru Yaman. Kelompok Houthi sendiri beraliran Islam Syiah yang gerakannya didukung oleh Iran yang juga merupakan negara Syiah terbesar didunia (Esfandiary & Tabatabai 2016, 155). Gerakan Houthi terbentuk diawal tahun 2000-an oleh Hussein Al-Houthi, seorang ulama Zaidi yang memisahkan diri dari gerakan yang ia bentuk pertama kali di Yaman, yaitu *Believing Youth Movement* (Salisbury 2015, 2). Hal ini memicu terjadinya pemberontakan didaerah Sa'dah, wilayah sebelah utara Yaman terhadap aksi pemerintah tersebut. Houthi sendiri muncul sebagai kekuatan Syiah utama di Yaman, yang menjadi oposisi dari pemerintahan Yaman.

Adanya konflik sipil antara pemerintahan Yaman dengan kelompok pemberontak Houthi, memunculkan pihak-pihak luar yang ikut terlibat didalamnya, salah satunya negara Iran. Iran memulai keterlibatan konflik Yaman saat Houthi dan pemerintah Yaman berkonfrontasi pada tahun 2009 atau yang dikenal pada saat itu perang Sa'da. Disaat itu, Iran mengirim bantuan pelatihan militer terhadap militan Houthi, persenjataan, serta dana untuk perang (Terril 2014, 435). Bantuan Iran ini bersifat terselubung. Disaat militan Houthi menguasai ibukota Sana'a,

hal ini tidak lepas dari bantuan terselubung Iran kepada militan Houthi

Keterlibatan Iran berlanjut dalam memberikan bantuan persenjataan kepada pemberontak Houthi dalam menghadapi pemerintah Hadi. Dalam hal ini, Iran memperkuat aliansinya dengan pemberontak Houthi untuk pertimbangan sektarian dan ideologis serta meningkatkan dukungan politik, media, keuangan, dan militer kepada mereka. Selain itu, Iran membangun hubungan dengan banyak tokoh politik di bekas Yaman Selatan seperti mantan presiden bagian ini, Ali Salem Beid. Mantan presiden itu juga mendukung beberapa partai Selatan dengan uang, media, senjata, dan pelatihan di Iran, Lebanon, Irak, dan Yaman. Hal ini dilakukan sebelum mereka putus dengan Teheran yang bertepatan dengan kemunculan Houthi sebagai kekuatan dominan yang didukung Iran dengan mengambil kendali Yaman Utara melalui kekuatan militer dan kemudian berusaha untuk mengendalikan wilayah Selatan (Al-Qadhi 2017, 26-27).

Dengan adanya keterlibatan Iran di Yaman, memunculkan respon dari negara tetangga yaitu Arab Saudi. Arab Saudi mengeluarkan kebijakan intervensi militernya di Yaman pada Maret 2015. Intervensi bertujuan untuk mengembalikan Hadi sebagai presiden dan untuk menghentikan pemberontakan Houthi yang di dukung oleh Iran. Sejak 2015, militer Saudi dan mitra koalisinya telah melakukan kampanye udara yang melawan Houthi dan sekutu mereka. Baru-baru ini, pada 1 September 2019, koalisi yang dipimpin Saudi melakukan serangan udara terhadap pusat penahanan yang dikelola Houthi, menimbulkan korban lebih dari 100 orang (Sharp 2019, 3).

Penggunaan intervensi militer Arab Saudi secara langsung merupakan cara yang tidak seperti biasanya dalam resolusi konflik di kawasan. Sebelumnya Arab Saudi selalu menggunakan pihak ketiga dalam resolusinya atau *proxy war*. Penggunaan ini telah berjalan selama bertahun-tahun, berawal ketika Arab Saudi menggunakan royalis Yaman untuk melawan Mesir Nasser pada 1960-an, Saddam Hussein Irak untuk melawan Iran pada 1980-an, dan AS untuk melawan Irak pada 1990-an (Yemeni 2009). Pada kasus di Yaman, Arab Saudi justru menggunakan secara langsung dalam resolusi konflik ini. Jika melihat pada kasus melawan Iran pada tahun 1980-an, Arab Saudi menggunakan Saddam Hussein Irak dalam menghadapinya. Namun dalam menghadapi Iran, Arab Saudi menggunakan cara intervensi militer secara langsung di Yaman dalam merespon kehadiran Iran.

Untuk mempertegas kebaruan dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk membandingkannya. Kebijakan intervensi militer Arab Saudi ke Yaman di masa pemerintahan Raja

Salman karena Arab Saudi ingin mencegah meluasnya konflik Yaman (Yolanda dan Saeri 2020). Kebijakan ini tidak lepas dari faktor individu dalam pengambilan kebijakan Arab Saudi, yaitu pribadi Pangeran Salman yang narsistik (Zahir dan Wahyudi 2019). Intervensi juga memperlihatkan kepemimpinan Arab Saudi yang bertujuan untuk menegaskan status Kerajaan sebagai kekuatan regional di Timur Tengah (Darwich 2018). Arab Saudi telah memanfaatkan konsep negara gagal untuk melegitimasi intervensi militernya ke Yaman dengan membingkai intervensi yang diperlukan untuk membangun kekuatan eksekutif yang kuat dan melindungi rakyat Yaman (Clausen 2018). Ini tidak lepas dari pembenaran Arab Saudi untuk intervensi juga mengacu pada retorika “perang melawan terror” yang ada, yang menunjukkan bahwa bahasa tersebut dapat meningkatkan penerimaan politik internasional dari intervensi yang dipertanyakan secara hukum (Buys dan Garwood-Gowers 2019).

Dari kelima penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat adanya *research gap* dari perbedaan dengan penelitian yang diangkat. Perbedaan tersebut adalah penelitian ini berfokus kepada kepentingan Arab Saudi sehingga menggunakan intervensi langsung, tidak seperti biasanya dalam menghadapi Iran. Penelitian ini juga membahas kepentingan Arab Saudi melakukan intervensi militernya di Yaman dalam merespon kehadiran Iran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan strategi penelitian yang biasanya lebih menekankan kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data (Bryman 2012, 36). Penelitian kualitatif menekankan pendekatan induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian, di mana penekanannya ditempatkan pada generasi teori. Kemudian, untuk unit analisis pada penelitian ini adalah kebijakan intervensi militer Arab Saudi di Yaman. Kemudian untuk level eksplanasinya adalah keterlibatan Iran di Yaman sehingga mempengaruhi unit analisis untuk bertindak. Dan kedua hubungan ini dilihat dalam level analisis tingkat negara.

Teknik pengumpulan data penelitian pada penelitian ini didasarkan kepada data-data primer dan sekunder. Data-data primer mencakup data-data yang berasal dari pemerintahan Arab Saudi langsung seperti website Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar, *speech* dari aktor negara, serta *white paper* dari Arab Saudi. Kemudian data-data pendukung yaitu data sekunder seperti buku, artikel jurnal, portal berita *online*, dan dokumen-dokumen yang dianggap valid untuk dijadikan referensi sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

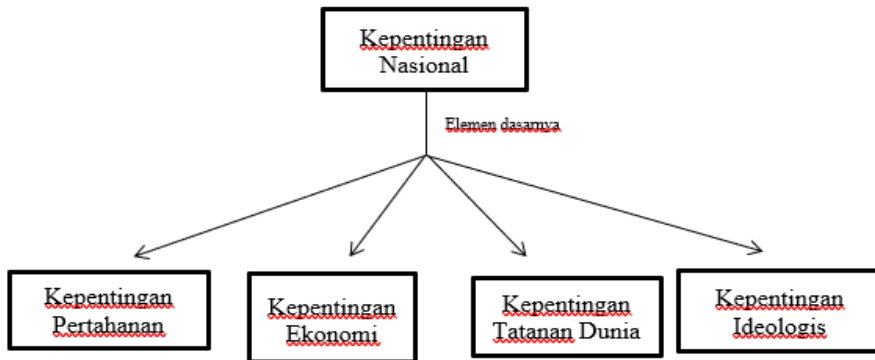
Analisis Kepentingan Nasional

Secara sederhana, kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal (Nuechterlein 1976, 247). Beberapa poin dalam definisi ini perlu dijabarkan. Pertama, berbicara tentang persepsi kebutuhan negara yang menunjukkan keputusan tentang apa yang menjadi kepentingan nasional adalah hasil dari proses politik yang mana para pemimpin suatu negara dapat memiliki pandangan berbeda mengenai kepentingan tersebut. Namun, pada akhirnya sampai pada kesimpulan tentang pentingnya masalah tertentu. Kedua, definisi ini berkaitan dengan negara-negara berdaulat yang sepenuhnya independen, bukan dengan organisasi internasional atau wilayah yang tergantung untuk lebih baik atau lebih buruk, karena negara menggunakan power untuk memaksakan pembatasan perdagangan dan untuk memasuki aliansi dibuat hanya oleh pemerintah negara berdaulat. Ketiga, definisi ini menarik perbedaan antara lingkungan eksternal dan internal (domestik) negara, yang terakhir ini biasanya disebut sebagai kepentingan publik. Akhirnya, definisi ini menyiratkan mengenai diskusi tentang kepentingan negara-bangsa secara keseluruhan, bukan tentang kelompok pribadi, birokrasi atau organisasi politik (Nuechterlein 1976, 247).

Namun, definisi singkat tentang kepentingan nasional ini tidak memberikan pedoman kepada *scholar* atau pembuat keputusan untuk membantu mengidentifikasi kepentingan-kepentingan tersebut. Sebagai upaya untuk melakukan hal ini adalah dengan membagi kepentingan nasional suatu negara menjadi empat kebutuhan dasar atau persyaratan yang membentuk dasar-dasar kebijakan luar negerinya (Nuechterlein 1976, 247-248). Pertama, kepentingan pertahanan. Kepentingan pertahanan merupakan perlindungan negara-bangsa dan warganya terhadap ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain atau ancaman yang diilhami secara eksternal terhadap sistem pemerintahannya. Kedua, kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan negara-bangsa dalam hubungan dengan negara-negara lain. Ketiga, kepentingan tatanan dunia. Kepentingan tatanan dunia merupakan pemeliharaan politik internasional dan sistem ekonomi di mana negara-bangsa dapat merasa aman, serta warga dan perdagangannya dapat beroperasi secara damai di luar perbatasannya. Keempat, kepentingan ideologis. Kepentingan ideologis merupakan perlindungan dan kelanjutan dari serangkaian nilai-nilai orang-orang dari negara-bangsa berbagi dan yakini baik secara universal.

Jelas bahwa kebutuhan dan keinginan ini tidak eksklusif satu sama lain dan harus ada kompromi dan/atau pertukaran diantara negara. Namun, jika seseorang memahami kepentingan nasional suatu negara, khususnya kekuatan utama, yang terdiri dari beberapa jenis kepentingan yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya, mungkin dapat melihat proses pengambilan keputusan negara-negara ini dengan lebih baik dan menentukan lebih akurat mengapa para pemimpin mereka membuat keputusan yang mereka lakukan (Nuechterlein 1976, 248). Arab Saudi mengeluarkan kebijakan intervensi militernya di Yaman dalam rangka membendung pengaruh Iran. Kebijakan ini didasari adanya kepentingan nasional yang dimiliki Arab Saudi. Terdapat beberapa elemen dasar dalam kepentingan nasionalnya, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi. Kerangka pemikiran mengenai kepentingan nasional Arab Saudi melakukan invasi militernya di Yaman dalam membendung pengaruh Iran digambarkan melalui bagan dibawah ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Kepentingan Nasional Arab Saudi



Sumber: Nuechterlein 1976

Hasil dan Diskusi

Keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam konflik Yaman tidak lepas dari konflik mereka berdua sendiri. Jika ditarik dari sejarahnya, hubungan kedua negara sudah memanas sejak awal Revolusi Iran pada tahun 1979 yang dibawa oleh Khomeini yang beraliran Syiah, sementara Arab Saudi sendiri merupakan negara yang beraliran dan mayoritas Sunni. Pada waktu itu, Shah Reza Pahlevi bagi revolusioner Iran dianggap sebagai sebuah kesombongan politik pada negara-negara Teluk. Sementara itu Arab Saudi menganggap bahwa Shah Reza Pahlevi merupakan sumber stabilitas dan penyeimbang di beberapa negara Timur Tengah (Rich

2012, 472). Baru-baru ini, konflik semakin hangat berawal Arab Saudi mengeksekusi ulama Syiah Sheikh Nimr-Al Nimr karena dianggap ingin melakukan tindakan terorisme. Hal tersebut langsung dibalas oleh Iran dengan menyerang kedutaan besar Arab Saudi di Teheran karena rasa simpati mereka sesama Syiah. Kemudian, hal ini menyulut kemarahan pemerintah Arab Saudi dengan memutuskan hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Iran yang mengakibatkan terjadinya krisis terbaru di Timur Tengah (Muhamad 2016, 5).

Setelah terjadinya konflik-konflik tersebut, kemudian *Arab Spring* melanda negara-negara Timur Tengah, khususnya Yaman yang memunculkan konflik internal di dalamnya. Iran hadir di Yaman membantu kelompok pemberontak Houthi melawan pemerintah Yaman. Hal ini mengakibatkan Presiden Hadi pergi ke Arab Saudi untuk meminta bantuan. Menanggapi permintaan presiden Hadi, koalisi yang dipimpin Arab Saudi yang sebagian besar negara-negara Arab termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab mulai melancarkan serangan udara dan blokade laut terhadap pasukan Houthi di bawah kampanye *Operation Decisive Storm* (Broder 2017, 11). Pada Juli 2015, koalisi yang dipimpin Saudi mampu merebut kembali Aden, Yaman (Cordesman 2017, 7). Sebagai upaya untuk mengurangi pasokan aliansi Houthi, koalisi yang dipimpin Saudi meluncurkan *Operation Golden Arrow* pada Januari 2016 untuk mengambil kendali pantai barat (Karakir 2018, 128).

Adanya kebijakan intervensi militer Arab Saudi ini, didasari oleh kepentingan nasional Arab Saudi dalam menghadapi keterlibatan Iran di Yaman terhadap pasukan Houthi. Sesuai dengan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, kepentingan nasional Arab Saudi berdasarkan pada beberapa hal yang dijelaskan di bawah ini.

Kepentingan Pertahanan

Seperti krisis sebelumnya, krisis terbaru di Yaman menyebabkan kekhawatiran di kalangan elit penguasa Saudi tentang perkembangan tersebut. Mereka memperhatikan bahwa melemahnya otoritas pusat di Yaman telah berkontribusi pada meningkatnya kekuatan Houthi yang memiliki hubungan dengan Iran. Selain itu, perluasan pengaruh di negara itu oleh kelompok-kelompok teroris seperti *Al-Qaeda in the Arabian Peninsula* (AQAP) akan memiliki konsekuensi keamanan negatif bagi Arab Saudi. Dengan demikian, mereka mencari stabilitas politik dan integritas teritorial Yaman, yang mereka pikir hanya mungkin dilakukan melalui pemerintah pusat yang kuat. Berdasarkan alasan ini, Arab Saudi mendukung Presiden Hadi dan bertujuan mengembalikan Hadi kepada

kekuasaan melalui intervensi militer langsungnya ke Yaman (Rugh 2015, 151).

Menyadari kelemahan dari blok Presiden Hadi, Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk secara aktif mendukungnya. Didukung oleh anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC) lainnya, Arab Saudi melancarkan operasi di Yaman pada 26 Maret 2015 dengan kampanye *Operation Decisive Storm*. Koalisi yang dipimpin Saudi terdiri dari sembilan negara Arab termasuk Arab Saudi, UEA, Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Maroko, Sudan dan Qatar, sampai pengusiran Qatar dari koalisi pada Juni 2017 setelah krisis diplomatik Qatar. Tujuan utama operasi ini adalah untuk mengamankan stabilitas di Yaman dan memulihkan pemerintahan nasional Presiden Hadi yang sah serta dipilih secara populer (Saudi Ministry of Foreign Affairs 2017, 13).

Menurut kepentingan pertahanan nasional Arab Saudi, ada empat alasan mendasar dibalik kesediaannya untuk menyetabilkan Yaman di bawah pemerintahan Presiden Hadi, yaitu mengamankan perbatasan Arab Saudi, membendung ambisi ekspansionis regional Iran, dan memerangi ancaman teroris dan menjaga keamanan regional (Saudi Ministry of Foreign Affairs 2017, 13). Dalam hal ini, perang melawan blok Houthi, yang diklaim bahwa didukung oleh Iran adalah prioritas utama Kerajaan Arab Saudi telah menjadi sasaran serangan oleh Houthi. Menurut Kementerian Luar Negeri Saudi, antara Mei 2015 dan 27 Januari 2017 terdapat lebih dari 40 serangan rudal oleh separatis Houthi yang menargetkan Arab Saudi, diantaranya sembilan rudal mengenai wilayah Saudi (Saudi Ministry of Foreign Affairs, 2017, 9). Hal ini mengakibatkan meningkatnya arus migrasi dari Yaman ke Arab Saudi yang merupakan komponen lain perhatian Saudi pada keamanan perbatasannya. Sebagai akibat dari krisis yang sedang berlangsung di Yaman, lebih dari satu juta pengungsi mencari perlindungan di tetangga utara mereka (Esfandiary dan Tabatabai 2016, 162).

Pihak berwenang Arab Saudi secara teratur menganggap Iran terlibat atas konflik Yaman yang berkepanjangan. Hal ini ditunjukkan oleh dukungan luas Iran untuk Houthi (Sharp 2019, 5). Koalisi yang dipimpin Arab Saudi juga mengutuk Iran karena melanggar embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Houthi, tetapi Iran terus menerus membantah tuduhan ini (Broder 2017, 11). Menyusul serangan rudal pada 4 November 2017 terhadap Bandara Internasional Raja Khalid Arab Saudi oleh Houthi, klaim rudal Saudi dalam serangan yang dipasok oleh Iran mencapai puncaknya (Broder 2017, 11).

Arab Saudi juga menegaskan bahwa intervensi diperlukan untuk

mempertahankan keamanannya sendiri. Arab Saudi melihat Yaman sebagai “halaman belakangnya” dan menyalahkan Iran karena mendukung pemberontak Houthi, dari minoritas Zaydi di negara itu, yang berperang bersama mantan presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh (Black, 2016). Selain itu, mata rantai terlemah dalam rantai keamanan Semenanjung Arab dan menjadi mangsa mudah bagi Teheran untuk menembus dan memanipulasi (Fattah, 2013). Bagi Arab Saudi, Houthi mewujudkan apa yang ingin dicapai Iran di seluruh dunia Arab, yaitu pembinaan aktor bersenjata non-negara dan non-Sunni yang dapat menekan musuh-musuh Iran baik secara politik maupun militer yang berakibat kepada ancaman terhadap pertahanan Arab Saudi (Sharp 2019, 2). Ini bisa menjelaskan kepentingan Arab Saudi dalam melancarkan kampanye militer di sana.

Kepentingan Ekonomi

Kepentingan Arab Saudi pada Yaman dimulai pada awal 1920-an dengan upaya untuk mengendalikan banyak sekali suku-suku Yaman dan mengamankan perbatasan luarnya. Alasan penting lainnya mengapa Arab Saudi tertarik pada Yaman adalah akses Sanaa ke selat *Bab el-Mandeb* yang menghubungkan Laut Merah ke Samudra Hindia dan merupakan gerbang utama Arab Saudi untuk mengeksport minyak (Gopalakrishnan, 2016).

Peran Arab Saudi menjadi hambatan yang kuat untuk peran Iran dan hambatan utama bagi upayanya untuk memperluas pengaruhnya di Yaman, yang bagi Arab Saudi merupakan area vital dan dianggap sebagai kedalaman strategisnya. Arab Saudi memiliki kehadiran yang kuat di Yaman karena ikatan sejarah, budaya, sosial, dan ekonomi. Pengaruh politik ini juga terkait dengan keakraban yang cukup dengan kompleksitas di sana, pengalaman Arab Saudi dalam menangani kompleksitas seperti itu, serta dukungan besar yang ditawarkan kepada aparat pemerintah dan non-pemerintah Yaman di sana. Beberapa memperkirakan jumlah dukungan Saudi ke Yaman selama beberapa tahun terakhir sekitar \$50 miliar (Al-Qadhi 2017, 60).

Mengingat hubungan dekat ini, Arab Saudi melakukan intervensi militer di Yaman dengan partisipasi banyak negara Arab lainnya. Langkah ini datang untuk melawan upaya Houthi yang memperluas kendali mereka atas semua wilayah Yaman oleh angkatan bersenjata dan untuk mengakhiri penetrasi pengaruh Iran di Yaman. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan pesan yang jelas kepada Iran bahwa Arab Saudi bertekad untuk melestarikan keseimbangan politik yang ada di Yaman karena menganggap Yaman sebagai area vital dan sarana kedalaman strategisnya. Riyadh juga ingin menyampaikan pesan kepada Iran bahwa mereka bertekad untuk

mempertahankan pengaruh dan kepentingannya dalam bidang vital ini dengan menggunakan cara yang berbeda, termasuk kekuatan kerasnya, yang telah sangat membatasi pergerakan Iran di Yaman (Al-Qadhi 2017, 61).

Intervensi militer Arab Saudi juga didasari oleh bantuan-bantuan yang diberikan Iran kepada pemberontak Houthi. Ketika bantuan ekonomi Iran dalam membantu pergerakan Houthi melawan pemerintah Hadi, maka hal ini berdampak kepada adanya pengaruh Iran di Yaman. Arab Saudi sebagai negara yang memiliki hubungan ekonomi yang dekat dengan Yaman, melakukan intervensi militernya untuk mengamankan pengaruh ekonominya dari kerjasama yang dibangun selama ini dengan Yaman. Hal ini dibuktikan adanya kerjasama-kerjasama yang dibangun oleh Teheran dengan Houthi. Teheran juga menyambut orang-orang dari Houthi dan kelompok Yaman lainnya untuk pendidikan agama (Salisbury 2015, 6). Baru-baru ini, jenis kegiatan ini meningkat ketika pejabat Houthi melakukan perjalanan ke Iran untuk membahas ikatan ekonomi dan politik. Hasilnya adalah serangkaian Nota Kesepahaman (MOU) tentang memperkuat bantuan, memodernisasi pelabuhan Al-Hudaydah, dan bekerja sama dalam transportasi laut (Esfandiary dan Tabatabai 2016, 165). Ini mengikuti MOU lain pada Februari 2015 kemudian meningkatkan jumlah penerbangan antara kedua negara (Sabaanews 2015).

Beberapa pemimpin Houthi sekarang telah mengakui bahwa mereka telah menerima dana dari Iran tetapi belum ada perincian tentang berapa banyak uang tunai yang diterima atau kapan pertama kali tersedia (Almasmari 2012). Strategi bantuan keuangan Iran memiliki beberapa potensi untuk sukses dan akan membantu Houthi mendanai pemberontakan mereka dan membeli senjata api dan amunisi tambahan, yang tersedia dari pedagang senjata domestik (Terrill 2014, 435). Kemudian, pemberontak Houthi juga mendapatkan paket bantuan ekonomi dari Iran. Delegasi Houthi baru saja kembali dari Iran dan seorang juru bicara mengatakan Iran telah berjanji untuk memperluas pelabuhan Yaman, membantu membangun pembangkit listrik dan menyediakan Yaman minyak yang cukup untuk bertahan setahun (Al-Jazeera 2015).

Kepentingan Tatanan Dunia

Arab Saudi adalah salah satu negara terkaya di Timur Tengah, yang memiliki status tertinggi sebagai produsen minyak utama. Selain itu, Arab Saudi adalah monarki pertama yang didirikan di Teluk, yang memberikan proyeksi sebagai model untuk wilayah yang lebih kecil di wilayah tersebut. Negara ini melihat dirinya sebagai pemimpin alami Teluk. Hal ini dapat dilihat di situs web Kementerian Urusan Luar Negeri, yang berbunyi

bahwa, “Arab Saudi menelusuri akarnya kembali ke peradaban paling awal di Semenanjung Arab. Sejak Raja Abdulaziz mendirikan Kerajaan modern pada tahun 1932, transformasinya sangat maju. Kerajaan telah mengubah dirinya dari negara padang pasir menjadi negara modern, canggih dan pemain utama di panggung internasional” (Saudi Ministry of Foreign Affairs, 2016). Hal itu menambah persepsi bahwa Riyadh ingin mengambil tempat penting dalam masalah ekonomi dan strategis di wilayah tersebut. Menurut mendiang Raja Abdullah, “kita adalah bagian dari dunia Arab, Islam, dan internasional. Peran kami didasarkan pada membela hak-hak mereka dan melakukan pengorbanan untuk persatuan di barisan mereka. Orang yang adil tidak dapat menyangkal peran kami” (Abdullah 2010). Oleh karena itu, Saudi memiliki citra aktor yang kuat dan stabil, serta sistem monarki yang sukses, yang harus ditiru oleh orang lain. Bagi mereka yang menerima kepemimpinan Saudi, Riyadh adalah sekutu yang sangat dermawan serta bersedia memberikan bantuan keuangan dan bimbingan agama (Cerioli 2018, 300-301).

Dibalik keinginan menganggap Arab Saudi sebagai pemimpin di kawasan Teluk, menjamin *status quo* juga sangat penting untuk mengamankan tidak hanya kepemimpinan regional Saudi tetapi juga sistem politik dan ekonominya. Sistem kesejahteraan berbasis minyak yang kompleks menjamin keabsahan monarki dan para pemimpin yakin bahwa ketidakstabilan di luar dapat memengaruhi hubungan negara-masyarakat di dalam negeri dan menjadi ancaman bagi kelanjutan rezimnya. Raja Abdullah menekankan bahwa Riyadh telah memainkan peran aktif di Teluk dan arena Islam untuk memperkuat basis kerja sama untuk menjaga identitas negara-negara Arab dan Muslim. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan masalah mereka, mempertahankan kepentingan mereka, serta menghadapi bahaya perpecahan dan perjuangan untuk mengancam entitas mereka (Abdullah dalam Cerioli 2018). Singkatnya, Riyadh memproyeksikan peran yang menentang kekuatan apa pun, negara atau non-negara, yang menyerukan revisi status quo (Cerioli 2018, 301).

Saudi memimpin dalam negosiasi yang menyingkirkan Saleh. Mereka telah terlibat di Yaman sejak awal protes, terutama karena mereka takut bahwa pemberontakan umum akan mempengaruhi stabilitas Semenanjung (Salisbury 2015, 6). Pada awal masa presiden Hadi, Arab Saudi mengintensifkan upayanya untuk menjamin stabilitas, meningkatkan pembayaran tunjangan untuk pemerintah Yaman, meningkatkan sumbangan amal, dan mengatur penggalangan dana internasional (Brehony 2015, 248). Ketika konflik meningkat, Arab Saudi segera menegaskan kembali aliansinya dengan rezim Hadi dan berusaha untuk melindunginya. Fokus pada penahanan krisis tetangga dan pemeliharaan

kesetiaan kepada mitra regional, keduanya berbicara pada keterkaitan peran kekuasaan regional dan penjamin stabilitas (Cerioli 2018, 308-309).

Saudi percaya bahwa Houthi merupakan ancaman yang signifikan terhadap keamanan kawasan karena hubungan mereka yang jelas dengan Iran. Dalam logika Saudi, mengambil sikap militer terhadap kelompok itu adalah cara untuk memeriksa ekspansi Iran yang tidak diinginkan di seluruh semenanjung (Clausen 2015, 20). Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan bahwa krisis tersebut adalah akibat langsung dari intrusi terang-terangan Iran ke dalam urusan internal Yaman. Teheran bertujuan untuk merusak keamanan dan stabilitas Yaman, memicu perpecahan sektarian dan menggagalkan upaya internasional yang berusaha untuk mencapai penyelesaian damai krisis Yaman (Saudi Arabia Embassy for Belgium 2016).

Maka keputusan Arab Saudi dalam mengeluarkan kebijakan intervensi militernya dalam menghadapi pengaruh Iran di Yaman adalah untuk menegaskan status Arab Saudi sebagai *regional power* di Timur Tengah. Klaim Saudi untuk kepemimpinan regional menerima hambatan karena Kerajaan gagal membangun koalisi melawan Iran. Pengaruh Iran di Irak, Yaman, dan Lebanon mengungkapkan kegagalan Kerajaan dalam bertindak sebagai kekuatan regional yang dapat mempengaruhi hasil di lingkungannya. Mengandalkan identitas Islamnya, Kerajaan berusaha menempatkan dirinya di pusat koalisi regional (atau dalam istilah sektarian koalisi "Sunni") untuk melawan musuh lama Syiah, Iran (Darwich 2018, 139). Untuk menghadapi pengaruh Iran yang mengganggu Saudi sebagai *regional power* di Timur Tengah, dengan menggunakan akumulasi kemampuan militernya dalam perang di Yaman, Kerajaan memiliki tujuan untuk menegaskan posisinya sebagai *regional power* secara lebih efektif (Darwich 2018, 140).

Dalam *regional power* nya di Timur Tengah, pemerintah Saudi percaya bahwa mereka membutuhkan musuh Iran untuk mempertahankan legitimasinya di dalam negeri. Kedua, Saudi melihat Iran (dan oposisi Saudi di Yaman) sebagai kekuatan yang menjadi ancaman di dunia Arab, khususnya GCC. Memang, sejak melemahnya Mesir setelah *Arab Spring*, Riyadh melihat dirinya sebagai pemimpin alami GCC dan dunia Arab dan Sunni yang lebih luas. Kepemimpinan ini, menurut kepercayaan Saudi, datang dengan tanggung jawab untuk berdiri dan menghadapi Iran (Esfandiary dan Tabatabai 2016, 163).

Kepentingan Ideologis

Nilai-nilai ideologi dan norma Wahhabi masuk ke dalam sistem politik

Arab Saudi, karena monarki diciptakan di bawah naungan nilai dan norma ini ini pada tahun 1932. Riyadh memegang dua dari tiga kota suci Islam, Madinah dan Mekkah, dan menampung haji, ziarah Muslim yang luas, menerima orang-orang dari seluruh dunia. Selain itu, gelar resmi raja adalah gelar “Penjaga Dua Masjid Suci”, yang memberinya “tugas Islam” untuk dipenuhi terhadap semua Muslim. Singkatnya, Arab Saudi memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin spiritual alami di kalangan Muslim yang, setelah kewajiban solidaritas Islamnya, memberikan sumbangan besar kepada organisasi-organisasi Islam (Cerioli 2018, 300).

Dengan Arab Saudi yang menganggap dirinya sebagai pemimpin spiritual Islam, khususnya sekte Sunni, hal itu mendapatkan tantangan dari Iran yang memandang dirinya sebagai pemimpin Sekte Syiah Islam. Iran memandang dirinya sebagai pembela ideologi Syiah dengan menghadirkan dirinya sebagai sumber agama, sponsor nilai-nilai Syiah, dan pelindung kelompok-kelompok Syiah di wilayah tersebut. Selain itu, Iran berusaha untuk menarik perhatian minoritas Syiah di negara-negara lain dan menyatukan mereka di bawah kepemimpinannya dengan mempromosikan kecenderungan sektarian dari minoritas ini dan melalui propaganda ideologis yang intens untuk mengintegrasikan dan menggunakannya dalam proyek-proyek politik regionalnya (Al-Qadhi 2017, 15). Hal itu dilakukan oleh Iran dengan mendukung kelompok pemberontak Houthi Yaman yang merupakan satu ideologi sektarian Syiah.

Arab Saudi melihat perang melawan Houthi sebagai perjuangan ideologis melawan Iran dan mengumumkan bahwa tidak ada hasil lain selain kemenangan total yang dapat diterima (Al-Rasheed 2015). Arab Saudi menggunakan wacana sektarian untuk membenarkan perlunya intervensi. Riyadh memproyeksikan dirinya sebagai pelindung agama Sunni yang harus memerangi sumber ketidakstabilan regional. Sangat menarik untuk dicatat bahwa narasi Saudi tentang membingkai Houthi sebagai Syiah yang bersekutu dengan Iran telah efektif (Cerioli 2018, 309).

Kemudian di balik intervensi Arab Saudi adalah untuk mencegah pengaruh Iran yang berkembang di Yaman. Para pemimpin Saudi telah curiga bahwa Syiah Houthi adalah *proxy* dari Iran dan bahwa bersama-sama mereka berusaha untuk mengepung Saudi (Rugh 2015, 147-148). Kerajaan memiliki minoritas Syiah dan karenanya elit penguasa Saudi khawatir tentang pengaruh Iran atas warga negara Syiah Saudi (Tzemprin, Jozic, dan Lambare 2015, 192). Dari perspektif ini, perang adalah reaksi terhadap pengaruh Iran yang berkembang di Semenanjung Arab melalui gerakan pemberontak Houthi (Al-Dosary 2015). Dalam menghadapi Iran, pemerintah Arab Saudi menggunakan media dalam membangun narasi menghadapi Syiah Iran yang mengancam Arab Saudi (Darwich 2018, 128).

Narasi lain berkembang dengan cepat sebagai alasan utama di balik keputusan Saudi, perang antara Kerajaan dan Houthis yang didukung Iran, yang digambarkan sebagai sekte Syiah (Al-Arabiya 2015). Dalam konteks ini, media dan otoritas keagamaan milik Saudi dengan cepat menggambarkan Yaman sebagai medan perang bagi Saudi untuk memerangi Syiah, yang dianggap sebagai ancaman tidak hanya bagi Yaman tetapi juga seluruh wilayah. Raja Salman menuduh orang-orang Houthis didukung oleh Iran dan menyebabkan perpecahan sektarian di Yaman (Al-Omari 2015). Saudi menganggap diri mereka sebagai pemimpin sekte Sunni Islam, orang Iran melihat diri mereka sebagai pemimpin sekte Syiah Islam. Akibatnya, telah terjadi persaingan abadi antara kedua negara untuk kepemimpinan dunia Islam (Karakir 2018, 140-141). Dengan kata lain, Kerajaan berusaha untuk menggambarkan intervensi di Yaman di pusat upaya regional Sunni untuk melawan ancaman Iran dan perluasan Syiah di Teluk (Darwich 2018, 139).

Dukungan Teheran beriklan kepada pemberontak Syiah adalah sangat penting bagi Riyadh mengingat kedekatan geografis Yaman. Melalui 65 persen populasi mayoritas Sunni dan sisanya Syiah, situasi tidak aman telah membayangi negara itu setelah *Arab Spring* telah menjadi perhatian utama bagi Arab Saudi. Justru perbatasan inilah yang membuat Yaman begitu penting bagi Arab Saudi karena pengaruh Syiah Iran di Sana'a dapat mengobarkan pemberontakan di provinsi-provinsi Timur dan Selatan Arab Saudi yang merupakan negara Sunni (Tzemprin, Jozic, dan Lambare 2015, 193).

Kesimpulan

Jika dilihat dasar dari kepentingan nasional Arab Saudi yang utama adalah kepentingan pertahanan dan tatanan dunia, di mana Arab Saudi sebagai negara tetangga Yaman merasa terancam oleh kehadiran bantuan Yaman terhadap kelompok pemberontak Houthis yang membahayakan keamanan negaranya. Kemudian, Arab Saudi dicitrakan di Timur Tengah sebagai negara pemimpin pada regional tersebut, dan Arab Saudi berhak untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasannya. Namun dengan adanya Iran, Arab Saudi menganggap Iran sebagai bentuk kekuatan baru di Timur Tengah yang ingin memberikan pengaruhnya, sehingga posisi Arab Saudi sebagai pemimpin kawasan merasa terancam dan berdampak kepada stabilitas kawasan dengan munculnya kekuatan baru yaitu Iran.

Kemudian mengenai citra, memenangkan perang Yaman sangat penting bagi otoritas dan kekuasaan Mohammad bin Salman (MBS), putra Raja Salman, dan yang berikutnya adalah raja Arab Saudi. MBS adalah panglima tertinggi dan wajah perang. Semua mata tertuju pada Kerajaan saat menuju perubahan generasi pertama dalam dinasti, karena MBS

akan menjadi cucu pertama Abdulaziz yang mengambil alih takhta. Putra Mahkota yang ambisius bertekad untuk membuat perubahan ekonomi, industri, dan kelembagaan yang signifikan di Arab Saudi, dan reformasi itu memerlukan dukungan domestik dan dukungan regional. Dengan demikian, kekalahan di Yaman bisa berarti tidak hanya pukulan terhadap kebijakan luar negeri Salman, tetapi juga pemogokan terhadap citra MBS dan tujuan jangka panjang (Al-Rasheed 2015).

Hal ini kemudian menjadi saran bagi penulis kedepannya untuk diadakannya penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana narasi-narasi yang dibentuk Arab Saudi dalam membangun citranya untuk menghadapi Iran. Narasi-narasi tersebut telah diuraikan pada bagian sebelumnya, di mana digunakan membangun citra Arab Saudi tidak hanya di Yaman saja, tetapi pada lingkup yang lebih luas pada kawasan Timur Tengah.

Referensi

Buku dan Bagian dalam Buku

- Bryman, A., 2012. *Social Research Methods, 4th Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Jamshidi, M., 2014. *The Future of the Arab Spring: Driving Social, Cultural, and Technological Innovation from the Grassroots*. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Artikel Jurnal

- Brehony, N., 2015. "Yemen and the Houthis: Genesis of the 2015 Crisis", *Asian Affairs*, **26**(2): 232-250
- Buys, E., and Garwood-Gowers, A., 2018. "The (Ir)Relevance of Human Suffering: Humanitarian Intervention and Saudi Arabia's Operation Decisive Storm in Yemen", *Journal of Conflict and Security Law*, **24**(1): 1-33.
- Cerioni, L. G., 2018. "Roles and International Behaviour: Saudi-Iranian Rivalry in Bahrain's and Yemen's Arab Spring", *Contexto Internacional*, **40**(2): 295-316.
- Clausen, M., 2015. "Understanding the Crisis in Yemen: Evaluating Competing Narratives", *The International Spectator*, **50**(3): 16-29.
- Clausen, M., 2018. "Justifying Military Intervention: Yemen as a Failed State", *Third World Quarterly*, **40**(3): 488-502.
- Darwich, M., 2018. "The Saudi Intervention in Yemen: Struggling for Status", *Turkey Insight*, **20**(2): 125-141.
- Esfandiary, D., and Tabatabai, A., 2016. "Yemen: An Opportunity for Iran-Saudi Dialogue?", *The Washington Quarterly*, **39**(2): 155-74.
- Juneau, T., 2013. "Yemen and the Arab Spring: Elite Struggles, State Collapse and Regional Security", *Orbis*, **57**(3): 408-23.
- Karakır İ. A., 2018. "Ongoing conflict in Yemen: A Proxy War?", *Tesam Akademi Dergisi*, **5**(2): 121- 149.
- Muhamad, S. V., 2016. "Krisis Hubungan Arab Saudi – Iran", *Info Singkat Hubungan Internasional*, **8**(1): 5-8.

- Nuechterlein, D. E., 1976. "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making", *British Journal of International Studies*, **2**(3): 246-266.
- Rich, B., 2012. "Gulf War 4.0: Iran, Saudi Arabia and the Complexification of the Persian Gulf Equation", *Islam and Christian – Muslim Relations*, **23**(4): 471-486.
- Rugh, W. A., 2015. "Problems in Yemen, Domestic and Foreign", *Middle East Policy*, **22**(4): 140-152.
- Terrill, W. A., 2014. "Iranian Involvement in Yemen", *Orbis*, **58**(3): 429-440.
- Tzemprin, A., Jozic, J., and Lambare, H., 2015. "The Middle East Cold War: Iran- Saudi Arabia and the Way Ahead". *Croatian Political Science Review*, **52**(4-5): 187- 202.
- Yolanda, W., dan Saeri, M., 2020. "Kebijakan Arab Saudi dalam Konflik Yaman pada Masa Pemerintahan Raja Salman", *JOM FISIP*, **7**: 1-16.
- Zahir, M., dan Wahyudi, F. E., 2019. "Kebijakan Arab Saudi Melakukan Intervensi Militer di Yaman dalam Perspektif Level Analisis Individu", *Journal of International Relations*, **5**(2): 290-303.

Laporan Penelitian

- Al-Qadhi, M. H., 2017. The Iranian Role in Yemen: and its Implications on the Regional Security, *Arabian Gulf Centre for Iranian Studies*.
- Cordesman, A. H., 2017. The War in Yemen: Hard Choices in a Hard War, *Center for Strategic & International Studies (CSIS)*. 1-16.
- Salisbury, P., 2015. Yemen and the Saudi–Iranian 'Cold War', *Middle East and North Africa Programme Research Paper*, The Royal Institute of International Affairs Chatham House.
- Sharp, J. M., 2019. Yemen: Civil War and Regional Intervention. *Congressional Research Service Report*, 1-21. Dalam <https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43960.pdf>, diakses tanggal 29 Desember 2021.

Artikel Online

- Abdullah, K. A., 2010. "King Opens Works of the 2nd Year of 5th Term of Majlis Al-Shura" [Online], Dalam <https://www.spa.gov.sa/756018?lang=ar&newsid=756018> [Diakses 2 Januari 2022].

- Al-Arabiya, 2015. "Council of Senior Scholars: Decisive Storm Is a Support for Legitimacy in Yemen" [Online]. Dalam <http://ara.tv/4b6yw> [Diakses 3 Januari 2022].
- Al-Dosary, S., 2015. "Iran Finally Admits to Regional Interference" [Online]. *Asharq Al-Awsat*. Dalam <https://engarchive.aawsat.com/salman-aldossary/opinion/opinion-iran-finally-admits-to-regionalinterference> [Diakses 2 Januari 2022].
- Al-Jazeera, 2015. "Houthis Say They Have Secured Aid Package from Iran" [Online]. Dalam <https://www.aljazeera.com/news/2015/03/houthis-secured-aid-package-iran-150314123957118.html> [Diakses 4 Januari 2022].
- Almasmari, H., 2012. "Houthi Officials Denies Receiving Arms from Iran" [Online]. *The National*. Dalam <https://www.thenational.ae/world/mena/houthi-official-denies-receiving-arms-from-iran-1.406142> [Diakses 2 Januari 2022].
- Al-Omari, M., 2015. "The Custodian of the Two Holy Mosques Warns Against Sectarianism" [Online]. Al-Hayat Newspaper. Dalam <https://goo.gl/bEsS9U> [Diakses 28 Desember 2021].
- Al-Rasheed, M., 2015. "King Salman Needs a Total Victory in Yemen" [Online]. *Al-Monitor: Gulf Pulse*. Dalam <http://www.al-monitor.com/pulse/ru/contents/articles/originals/2015/05/saudi-arabia-finds-no-quick-victory-yemen.html> [Diakses 31 Desember 2021].
- Black, I., 2016. "Saudi Arabia Sees Yemen Intervention as Defence of 'Backyard'" [Online]. *The Guardian*. Dalam <https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/saudi-arabia-sees-yemen-intervention-as-defence-of-backyard> [Diakses 7 Januari 2022].
- Broder, J., 2017. "Hit and Missile" [Online]. *Newsweek*. Dalam <https://www.scribd.com/article/367699143/Hit-And-Missile> [Diakses 6 Januari 2022].
- Fattah, K., 2013. "Yemen – Another Battlefield in Saudi–Iran Proxy War" [Online]. *Middle East Voices, VOA News*. Dalam <http://middleeastvoices.voanews.com/2013/11/insight-yemen-another->
- Black, I., 2016. "Saudi Arabia Sees Yemen Intervention as Defence of 'Backyard'" [Online]. *The Guardian*. Dalam <https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/saudi-arabia-sees-yemen-intervention-as-defence-of-backyard> [Diakses 7 Januari 2022].

- Gopalakrishnan, M., 2016. "Why is Saudi Arabia Interested in Yemen?" [Online]. *DW News*. Dalam <https://www.dw.com/en/why-is-saudi-arabia-interested-in-yemen/a-36000785> [Diakses 30 Desember 2022].
- Gordon, A., dan Parkinson, S., 2018. "How the Houthis Became Shi'a" [Online]. Middle East Report Online. Dalam <http://www.merip.org/mero/mero012718> [Diakses 8 Januari 2022].
- Ministry of Foreign Affairs of Saudi Arabia, 2016. "Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Foreign Affairs" [Online]. Dalam <http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen> [Diakses 31 Desember 2021].
- Sabaa News, 2015. "Yemen, Iran Sign MoU in Air Transport Field" [Online]. Yemen News Agency. Dalam <http://www.sabanews.net/en/news389716.htm> [Diakses 5 Januari 2022].
- Saudi Arabia Embassy for Belgium, 2016. "Saudi Arabia Condemns Ongoing Iranian Regional Interference and Aggression" [Online]. Dalam <http://ksaembassy.be/en/saudi-arabia-condemns-ongoing-iranian-regional-interference-aggression/> [Diakses 4 Januari 2022].
- Saudi Ministry of Foreign Affairs, 2017. "Saudi Arabia and the Yemen Conflict" [Online]. Dalam [https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/WhitePaper Yemen April2017 o.pdf](https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/WhitePaper%20Yemen%20April2017%20o.pdf) [Diakses 31 Desember 2021].
- Yamani, M., 2009. "Saudi Arabia Goes to War" [Online]. The Guardian. Dalam <https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/nov/23/saudi-arabia-yemen-houthi-war>, [Diakses 9 Januari 2022].